

BAB II

HUBUNGAN JEPANG DENGAN KOREA SELATAN

Jepang dan Korea Selatan merupakan negara tetangga yang saling membutuhkan satu sama lain, namun memiliki hubungan pasang surut. Dengan sebutan "negara dekat, namun jauh" dapat dilihat bahwa kedua negara tersebut memiliki isu-isu yang belum terselesaikan. Kedua negara masih memiliki beberapa permasalahan. Perebutan Pulau Dokdo (dalam bahasa Korea) atau Takeshima (dalam bahasa Jepang) dan isu mengenai sentimen anti-Jepang oleh masyarakat Korea dan anti-Korea oleh masyarakat Jepang akibat kolonialisasi Jepang abad 20 serta isu *comfort women* hingga saat ini masih hangat diperbincangkan, meskipun sudah mencapai kesepakatan penyelesaian terkait isu tersebut.

Hubungan diplomatik antarkedua negara yang selalu mengalami pasang surut ini berhubungan dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Dalam Bab II ini akan dijelaskan hubungan Jepang dengan Korea Selatan sejak masa imperealisme Jepang di Semenanjung Korea hingga saat ini, yaitu pada masa pemerintahan Shinzo Abe dengan maksud untuk menghubungkan kebijakan Jepang saat ini dan upayanya dalam menyelesaikan isu *comfort women*.

A. Hubungan Jepang dengan Korea pada Masa Imperialisme Jepang di Semenanjung Korea

Pasca Restorasi Meiji tahun 1869, Jepang mengalami berbagai perubahan pada struktur politik dan sosial. Percepatan industrialisasi Jepang yang semakin meningkat menjadikan Jepang memiliki kekuatan nasional yang kuat. Dinasti Ming sebagai 'guardian' Korea dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1894. Selanjutnya Jepang juga mengalahkan Rusia yang sempat tertarik pada Semenanjung Korea. Setelah berhasil mengalahkan Dinasti Ming dan Rusia, Jepang menganeksasi Korea pada tahun 1910. Pencaplokan wilayah semenanjung Korea berawal dari insiden pembunuhan Ratu Myeongseong. Pemerintahan Jepang menganggap bahwa Ratu Myeongseong menghalangi usaha Jepang untuk melakukan ekspansi kekuasaan di Semenanjung Korea. Pada akhirnya, Ratu Myeongseong berhasil dibunuh oleh Miura Goro seorang mata-mata Jepang pada 8 Oktober 1895 di istana Gyeongbok.

Setelah insiden pembunuhan tersebut, Jepang mendapat banyak protes dari internasional dan menjadikan Miura sebagai tersangka. Karena tidak adanya bukti yang kuat, Miura dibebaskan dari tuduhan tersebut. Sebelumnya pada tahun 1905 Kekaisaran Jepang dan Kerajaan Korea membentuk Perjanjian Eulsa yang menjadikan Korea sebagai negara protektorat Jepang yang artinya Jepang berwenang penuh atas urusan dalam negeri Korea. Selanjutnya pada tahun 1910 setelah insiden pembunuhan sang ratu, Jepang

dan Korea membentuk traktat aneksasi yang menjadikan tanah semenanjung Korea menjadi wilayah kekuasaan Jepang secara penuh (Yoon, 2015).

Selama kekuasaan Jepang di Semenanjung Korea, segala sesuatu yang berhubungan dengan Korea dihapuskan dan diganti dengan budaya, bahasa, dan tulisan Jepang. Bahkan, nama masyarakat Korea harus diganti dengan nama Jepang. Keluarga kerajaan Korea pun secara perlahan-lahan dipindah dari Korea ke Jepang dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan. Namun demikian sebenarnya tujuan Jepang ialah untuk menghilangkan kekuatan kerajaan Korea agar Jepang sukses untuk menguasai tanah Semenanjung Korea.

Pada masa ini sebagian besar masyarakat Korea dipekerjakan secara kasar (kerja romusha) di Jepang dan Korea. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik tanpa ada perhatian dan mengabaikan kesehatannya. Kerja romusha ini menghasilkan banyak korban kematian. Banyaknya masyarakat Korea yang dibiarkan kelaparan, namun harus tetap bekerja menjadikan jumlah korban pekerja romusha semakin meningkat. Kekejaman Jepang berlanjut pada perbudakan seks atau disebut juga *comfort women*. Jepang membentuk sebuah kebijakan, yaitu perempuan-perempuan Korea yang sebagian besar berumur belasan tahun dijadikan budak seks dan dikirim ke berbagai daerah, terutama di China, dan sebagian wilayah Korea. Sebagian perempuan yang dijadikan budak seks tersebut dijual oleh orang tuanya karena situasi ekonomi yang buruk. Sebagian perempuan lainnya diambil secara paksa di wilayah-

wilayah pedesaan dan beberapa dari mereka diiming-imingi sebuah pekerjaan di Jepang, namun berakhir di rumah-rumah bordil di Korea ataupun China.

Kekejaman Jepang di Korea berakhir pada Agustus 1945 saat Jepang dibom oleh Amerika Serikat di dua wilayahnya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa tersebut terjadi setelah Jepang melakukan penyerangan di Pearl Harbour pada tahun 1941 yang menjadikan Amerika Serikat kemudian ikut terlibat secara langsung dalam Perang Dunia II. Jepang akhirnya menyatakan kekalahan dan menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu. Pernyataan tersebut sekaligus menandatangani kebebasan atas imperialisme Jepang di Korea. Setelah itu Korea menyatakan kemerdekaannya pada 15 Agustus 1945 (Yoon, 2015).

Pasca Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu, kebijakan luar negeri Jepang memiliki banyak tuntutan dari pihak-pihak yang terlibat, terutama korban-korban. Dimulai pada tahun 1950--1980an banyak warga Jepang yang mengajukan tuntutan ke pemerintah untuk memberikan kompensasi atas kematian keluarga mereka, luka atau cacat permanen pada tubuh dan hilangnya aset-aset mereka. Tahun 1970a--1990an, mantan pegawai militer Jepang yang berwarga negara Korea dan tinggal di Jepang menuntut untuk diberi tunjangan dari pemerintah Jepang atas jasa yang mereka berikan selama mengabdikan pada kekaisaran Jepang. Selanjutnya sekitar tahun 1991, mantan *Comfort women* mulai mengajukan permintaan kompensasi dan permintaan maaf secara resmi dari Jepang (Umeda, 2008).

B. Hubungan Jepang dengan Korea Selatan pada Masa Normalisasi

Penjajahan Jepang di Semenanjung Korea meninggalkan bekas luka yang sangat dalam bagi masyarakat Korea. Selama 36 tahun Semenanjung Korea berada di bawah penguasaan Jepang. Enam minggu setelah perjanjian damai San Fransisco, yaitu pada tahun 1951, Jepang memulai memperbaiki hubungan dengan Republik of Korea (Korea Selatan) serta berniat untuk membentuk hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Namun demikian, usaha tersebut baru berhasil pada tahun 1965 (Matake, 2000). Hal ini terjadi karena adanya beberapa alasan. Perang Korea yang mengakibatkan Semenanjung Korea terpisah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan menjadi salah satu alasan tertundanya usaha pembentukan hubungan diplomatik Jepang dengan Korea.

Selanjutnya Jepang memandang bahwa sikap Syngman Rhee yang sangat anti-Jepang membuat usaha damai Jepang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sikap yang ditunjukkan Rhee berupa deklarasi Rhee yang menyebutkan bahwa batas kedaulatan di perairan Korea termasuk seluruh wilayah sekitar semenanjung, Pulau Takhesima juga sempat menjadi sengketa antara Jepang dan Korea di awal normalisasi hubungan. Selain itu, ada juga faktor perbedaan sikap kedua belah pihak yang bersangkutan dalam memandang situasi waktu itu. Korea memandang Jepang hanya menyebabkan rasa sakit terhadap orang-orang Korea. Meskipun Jepang mengakui hal itu Jepang juga memberikan pernyataan bahwa Jepang tidak hanya memberikan rasa sakit, Jepang telah memberikan beberapa keuntungan untuk tanah Korea

seperti pembangunan di bidang pertanian, pembuatan rel kereta dan pelabuhan, serta mendirikan sistem pendidikan yang modern.

Dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Selatan, tahun 1965 merupakan awal mula Menteri Luar Negeri Jepang mengunjungi Korea Selatan dan menyampaikan permintaan maaf serta mengekspresikan penyesalan yang mendalam. Kala itu sang Menteri juga memberikan kompensasi ekonomi sebanyak 500 juta USD kemudian 4 bulan setelah itu Jepang dan Korea Selatan melakukan kerja sama ekonomi (Matake, 2000).

C. Hubungan Jepang dengan Korea Selatan Pasca Normalisasi

Pada awal normalisasi, hubungan Jepang dan Korea Selatan hanya sebatas kerja sama ekonomi, belum merambah kerja sama keamanan karena memang pada tahun 1960--1970an Jepang belum menganggap Korea Selatan sebagai partner yang penting, terlebih karena adanya faktor Amerika Serikat di belakangnya (pasca Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu, politik luar negeri Jepang sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat). Kemudian pada tahun 1983 Perdana Menteri Nakasone untuk pertama kalinya melakukan kunjungan resmi ke Korea Selatan. Pada kunjungan tersebut Nakasone menjanjikan kepada Korea Selatan akan memberikan bantuan ekonomi sebesar 4 juta USD, namun melarang dana tersebut untuk dihibahkan ke militer. Kemudian pada tahun 1984 Presiden Chun melakukan balasan kunjungan ke Tokyo yang juga merupakan kunjungan resmi pertama ke

Tokyo pada era pasca perang. Sejak saat itu hubungan kedua negara ini semakin membaik.

Sampai dengan tahun 1982, Jepang belum menunjukkan sikap tertarik pada kerja sama keamanan dengan Korea Selatan hingga ada pada suatu peristiwa yaitu peristiwa ketika *Democratic People's Republik of Korea* (Korea Utara) menembakkan rudal miliknya, yaitu Taepodong, ke Jepang pada tahun 1998. Sejak peristiwa itu Jepang menganggap Korea Utara merupakan ancaman dan harus bekerja sama dengan Korea Selatan untuk keamanan Korea Selatan dan Jepang sendiri. Sebelum peristiwa Taepodong, pada tahun 1970-an sebenarnya Jepang membuat inisiatif untuk melakukan hubungan dengan Korea Utara karena bagi Jepang, stabilitas keamanan Korea Utara dan Korea Selatan sangat penting bagi keamanan Jepang.

Sejak perang dingin selesai, terdapat perubahan yang tampak pada kebijakan Jepang terhadap Korea Selatan. Jepang memulai untuk bekerja sama dengan Korea Selatan pada bidang keamanan. Hal ini terjadi karena Korea Utara menjadi ancaman keamanan di Asia Timur. Penggabungan dalam pelatihan militer laut untuk pertama kalinya diadakan pada tahun 1999 oleh Jepang dan Korea Selatan.

Keluar dari perubahan itu, diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan tetaplah dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat. Jepang tidak dapat berperan langsung dalam kegiatan militer dan strategi terhadap Semenanjung Korea karena konstitusi perdamaian antara Jepang dan Korea sehingga untuk mengantisipasi ancaman dari Korea Utara, Jepang masih bergantung pada

Amerika Serikat. Sikap Jepang pada masa pasca Perang Dingin memiliki 3 karakteristik terhadap Semenanjung Korea, yaitu tetap berada pada pengaruh Amerika Serikat, sikap pasif, dan sikap minimalis.

Setelah berkali-kali meminta maaf dan mengekspresikan penyesalan yang mendalam oleh pejabat tinggi Jepang terhadap Korea Selatan, pada akhirnya, yaitu tahun 1999, setelah 34 tahun Jepang berusaha, Korea Selatan yang diwakili oleh Presiden Kim Dae Jung menyatakan bahwa ia menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Obuchi Keizo ketika Presiden Kim mengunjungi Jepang. Pasca penerimaan maaf tersebut, hubungan Jepang dengan Korea Selatan menjadi lebih baik (Matake, 2000).

Pada masa pemerintahan Junichiro sempat timbul permasalahan akibat kunjungannya ke Kuil Yasukuni. Kuil tersebut merupakan tempat persemayaman orang-orang yang terlibat dalam Restorasi Miji hingga Perang Dunia II. Termasuk prajurit-prajurit Jepang yang berjasa pada kekaisaran disemayamkan di dalam kuil tersebut. Dalam lima tahun terakhir, pejabat Jepang tidak mengunjungi kuil tersebut karena adanya sentimen dari Korea Selatan, Korea Utara, dan China. Namun demikian, Junichiro pada awal kekuasaannya, ia mengunjungi kuil tersebut dan mendapat kecaman keras dari Korea Selatan dan China. Karena kejadian tersebut, perwakilan Korea Selatan dan China menolak untuk melakukan pertemuannya di Jepang ataupun di negara masing-masing (Times, 2001). Meskipun sempat tersendat, hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang pada masa pemerintahan

Koizumi akhirnya membaik sejak Shinzo Abe menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2006.

Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri Jepang yang ke-57. Ia pertama kali terpilih menjadi Perdana Menteri pada tahun 2006 menggantikan Junichiro Koizumi. Namun demikian, pada tahun 2007 ia mengundurkan diri dari jabatannya dan mengajukan kembali untuk menjadi Perdana Menteri pada tahun 2012. Setelah kemenangannya pada tahun 2012, Abe yang dikenal sebagai sosok yang konservatif nasionalis, menyusun kebijakan-kebijakan yang dikampanyekan seperti upaya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan China dengan suatu pengambilan kebijakan garis keras, menjanjikan akan mengakhiri stagnasi ekonomi, meningkatkan peran SDF (Self-Defense Force) dan memperbaiki status Jepang dalam dunia internasional dengan menjadikan Jepang sebagai negara “normal” (Sebok, 2013).

Selain keempat kebijakan tersebut, Jepang juga masih memiliki banyak tanggungan yang harus diselesaikan terkait dengan “Post-War History” termasuk dengan Korea Selatan. Sebagai negara yang telah menganeksasi Semenanjung Korea selama 35 tahun, Jepang masih menanggung pertanggungjawaban moral dan finansial. Meskipun telah berulang kali disampaikan permintaan maaf dan penyesalan yang mendalam oleh beberapa pendahulunya, saat Shinzo Abe mulai menjadi Perdana Menteri, ia juga menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan yang mendalam atas imperealisme Jepang di Korea. Permintaan maaf tersebut telah menjadi agenda wajib bagi setiap petinggi negara Jepang. Hal itu selalu

disampaikan karena Korea dan China tidak ingin Jepang lupa siapa Jepang di mata Korea dan China karena pada dasarnya Korea masih memiliki trauma jika Jepang nantinya akan kembali agresif.

Tidak berbeda jauh dari politik luar negeri era Perdana Menteri sebelum-sebelumnya, politik luar negeri Jepang terhadap Korea Selatan masih dipengaruhi oleh Amerika Serikat karena Jepang merupakan aliansi terkuat Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, yang bertugas menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Amerika Serikat selalu menekankan pada hubungan bilateral Jepang--Korea Selatan agar tetap terjaga salah satunya dengan kerja sama dan menyelesaikan konflik-konflik yang ada.

Yang berbeda dengan sikap Shinzo Abe dengan Perdana Menteri sebelumnya ialah, ia bersikeras mengembalikan citra Jepang di mata dunia dengan salah satu caranya Shinzo Abe telah lama berencana untuk menjadikan negara Jepang sebagai negara 'normal' dengan merevisi artikel 9. Kemudian ia juga berusaha membangun kepercayaan kepada negara terdekatnya, yaitu Korea Selatan. Selama ini penghambat hubungan Jepang dan Korea Selatan berhubungan dengan sejarah imperealisme Jepang sehingga hal utama yang dilakukan Abe adalah mengungkapkan permintaan maaf dan rasa penyesalan kepada seluruh rakyat Korea.

Pada tahun 2013 Shinzo Abe untuk pertama kalinya mengunjungi kuil Yasukuni dan saat itu ia mendapat kecaman keras dari Korea Selatan dan China sehingga Korea Selatan sendiri menolak untuk melakukan pertemuan resmi kepala negara dengan Jepang. Pada saat itu, Abe mengakui bahwa

kunjungannya tersebut tidak bertujuan untuk menyulut konflik dengan Korea ataupun China. Kunjungan tersebut murni dilakukan Abe sebagai rakyat Jepang bukan sebagai Perdana Menteri. Ia menekankan bahwa tujuannya saat itu ialah untuk bersumpah dan bertekad bahwa perang tidak akan terjadi lagi karena pada dasarnya akan menimbulkan penderitaan bagi warga Jepang juga. Meskipun demikian, ia tetap mendapat kritik dari Korea Selatan dan China (Wingfield-Hayes, 2013).

Akibat sentimen kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe dan berbagai masalah dengan Korea Selatan yang belum terselesaikan, Korea Selatan beberapa kali menolak mengadakan pertemuan resmi seperti kunjungan kepala negara di negara masing-masing. Namun demikian, kedua kepala negara sempat bertemu dalam konferensi resmi, yaitu pada 25 Maret 2014. Jepang, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan pertemuan Trilateral KTT Keamanan Nuklir di Den Haag, Belanda. Pertemuan tersebut menandai untuk pertama kalinya Perdana Menteri Abe bertemu dengan President Park secara pribadi. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin menegaskan pentingnya kolaborasi yang lebih dekat antara tiga negara pada hal-hal yang menyangkut keamanan Asia Timur, dengan fokus utama pada isu-isu yang melibatkan Korea Utara (Diplomatic Blue Book, 2015).

Selain itu, pada pertemuan 9 Agustus 2015 menteri luar negeri dari Jepang dan Korea Selatan melakukan pertemuan saat berada di Myanmar untuk menghadiri ASEAN Foreign Ministerial Meeting. Menteri Luar Negeri Kishida dan Menteri Luar Negeri Yun Byung-Se membahas hubungan

bilateral kedua negara untuk mencapai kemajuan dan sepakat untuk terus memastikan komunikasi yang erat dalam berbagai bidang (Diplomatic Blue Book, 2015).

Pembicaraan lebih lanjut antara kedua menteri luar negeri diadakan kembali pada 26 September saat berada di UN General Assembly Session, New York. Mereka menegaskan kembali pentingnya menjaga dan memperdalam dialog politik tingkat tinggi antara Jepang dan Korea Selatan, serta menegaskan sekali lagi bahwa kedua belah pihak akan berusaha untuk memastikan bahwa peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan dapat digelar dalam kondisi positif.

Dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan, untuk pertama kalinya dalam tiga setengah tahun setelah Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, mengadakan pertemuan resmi kepala negara, yaitu dengan Park Geun Hye yang menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Pertemuan tersebut dilakukan pada 2 November 2015 di Seoul dan menjadi *ice breaking* dari hiatus yang dilakukan pejabat pemerintah sebelumnya (Diplomatic Blue Book, 2015). Seperti diketahui bahwa hubungan Jepang dan Korea Selatan sempat memburuk pada masa pemerintahan Junichiro akibat kunjungannya yang terhitung beberapa kali ke kuil Yasukuni.

Pertemuan tersebut membahas beberapa isu seperti *Comfort women* yang didesak untuk segera melakukan resolusi penyelesaian isu tersebut. Shinzo Abe menyatakan setuju untuk membahas isu ini lebih serius agar

mendapatkan hasil kesepakatan yang akhirnya akan mengakhiri isu *Comfort women* yang telah lama menjadi masalah besar antara kedua negara aliansi Amerika ini. Abe juga berharap kunjungan kenegaraannya ini dapat menjadikan hubungan bilateral Jepang--Korea Selatan lebih kuat pada masa depan.

Sesuai janji kedua kepala negara, Jepang dan Korea Selatan akhirnya menandai 50 tahun normalisasinya dengan penyelesaian isu *comfort women*, yaitu dengan membentuk kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak pada 28 Desember 2015. Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan sebagai perwakilan dari Perdana Menteri Jepang dan Presiden Korea Selatan. Kesepakatan tersebut berisi pemberian dana kompensasi sebesar US\$8.6 Juta yang ditujukan untuk kepentingan kesehatan mantan *comfort women* yang masih hidup hingga saat ini di Korea Selatan (Woo, 2015). Dana tersebut berasal dari budget negara Jepang. Jepang juga meminta untuk menghilangkan patung lambang *comfort women* yang ada di depan kantor kedutaan besar Jepang di Seoul. Kesepakatan ini bersifat “Finally and Irreversible” dimana kesepakatan ini merupakan akhir dari isu *comfort women* dan sifatnya tidak dapat dirubah.